

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang memiliki taraf pembangunan ekonomi relatif rendah. Dalam hal ini, peranan pemerintah sangat diperlukan untuk melakukan intervensi kebijakan bagi peningkatan kualitas pembangunan. Berbagai upaya telah dilakukan, termasuk dalam ruang lingkup kebijakan fiskal yang dimana kebijakan ekonomi dilakukan oleh pemerintah terhadap penerimaan dan pengeluaran untuk mencapai tujuan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas perekonomian dan pendistribusian pendapatan yang merata. Dalam upaya untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat, langkah yang dilakukan oleh pemerintah adalah berusaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri, yaitu dengan upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dilakukan agar dapat membantu meningkatkan penerimaan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sudah ada ataupun dengan penggalian sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baru sesuai dengan ketentuan dengan melihat kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. (Maria Sisilia, 2021)

Salah satu indikator penting dalam melihat keberhasilan pembangunan ekonomi disuatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan output dalam suatu perekonomian. Indikator ini juga memberikan indikasi tentang sejauh mana aktivitas perekonomian selama periode tertentu dalam menghasilkan pendapatan bagi masyarakat. (Irmal Suandi, 2016)

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu kontribusi pemerintah kepada kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator untuk menyejahterakan masyarakat disuatu wilayah atau Negara. Keberhasilan suatu

wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diukur dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang berjalan dengan baik. Tinggi rendahnya laju pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah menunjukkan tingkat perubahan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya. (Hasrini Hakim, 2021)

Kota Kediri adalah kota paling besar nomor 3 di Jawa Timur yang terletak pada 130 km di bagian barat daya Kota Surabaya. Kota Kediri berdiri diatas lahan seluas 67,2 km<sup>2</sup>. Di tahun 2020, menurut hasil SP2020 jumlah penduduk yang berada di Kota Kediri sebanyak 286.796 orang/jiwa. Kota Kediri masih berada dalam masa bonus demografi dikarenakan 71,58 persen penduduk dari kota ini masih terletak dalam usia produktif (15-64 tahun). Secara administrative, Kota Kediri terdiri dari tiga kecamatan, yakni kecamatan Mojoagung, kecamatan Kota dan kecamatan Pesantren serta 46 kelurahan dibawah pimpinan Wali Kota Kediri.

Seiring peningkatan terhadap kualitas di sejumlah aspek, diawali dengan pendidikan, pariwisata, perdagangan, birokrasi pemerintah, olahraga sampai pusat perbelanjaan dari pasar tradisional sampai pasar modern menjadikan Kota Kediri menjadi lebih berkembang. Kota Kediri disebut juga sebagai pusat perdagangan gula dan industry rokok kretek Gudang Garam yang berkembang. Kota ini dinominasikan berdasarkan kepada survei yang dilakukan oleh SWA dimana mendapatkan bantuan dari Business Digest sebagai peringkat pertama Indonesia Most Recommended City for Investment pada tahun 2010. Industry rokok Gudang Garam menjadi penopang perekonomian warga Kediri. Mayoritas warga Kediri bergantung kepada perusahaan rokok Gudang Garam dimana menjadi perusahaan paling besar di Indonesia sekaligus menyumbangkan pajak dan cukai yang relative besar kepada pemerintah kota. Kota Kediri diberikan suatu penghargaan sebagai kota yang kondusif dalam melakukan investasi dari suatu ajang yang berhubungan terhadap pelayanan masyarakat dan

kualitas ekonomi. Kota ini menjadi sasaran para investor untuk menanamkan modalnya di Kota Kediri. Perguruan tinggi swasta, pondok pesantren juga memberikan dampak dalam sector perekonomian di kota ini.

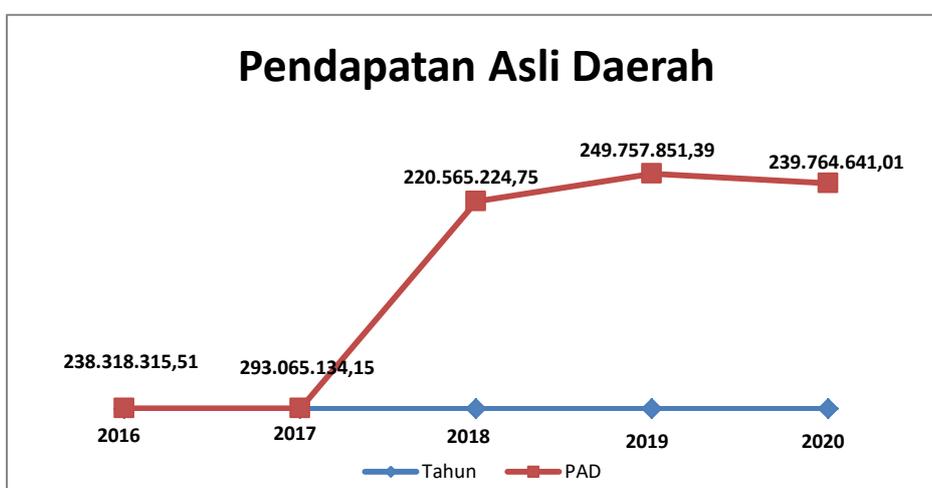
Adanya pandemic COVID-19 menyebabkan banyaknya dampak dalam segala aspek, termasuk ekonomi, social dan pendidikan. Virus COVID-19 ini bisa mengalami penyebaran kepada manusia serta hewan melalui saluran pernapasan yang ditandai melalui gejala awal flu sehingga bisa mengakibatkan sindrom pernapasan akut berat(SARS). Virus ini dapat menyebar secara cepat dan telah masuk ke wilayah Indonesia. Kemenkes Republik Indonesia pada tahun 2020 mengkonfirmasi total kasus pandemic COVID-19 sebanyak 165.887 dengan jumlah 7.169 kematian di 34 provinsi. Pada tahun 2020, adanya pandemic COVID-19 menjadi pusat perhatian oleh bangsa Indonesia. Banyak dampak yang ditimbulkan oleh adanya virus tersebut, diantaranya adalah terjadi penurunan dalam perekonomian Indonesia. Pemerintah dengan cepat melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan ini dengan membentuk sejumlah kebijakan guna menangani virus COVID-19 ini. Upaya yang pemerintah jalankan diantaranya adalah pemberlakuan social distancing dan diberlakukannya PSBB dimana tertuang pada Peraturan pemerintah No 21 Tahun 2020. Melalui berlakunya PSBB yang diterapkan diberbagai wilayah menyebabkan semua kegiatan yang biasa beroperasi terpaksa diberhentikan. Dalam sector Pendidikan, layanan public, tempat beribadah, pusat perbelanjaan, rumah makan dan tempat wisata juga terpaksa dihentikan. Dalam sector ekonomi, adanya pandemic COVID-19 di Indonesia menyebabkan timbulnya PHK dalam skala besar, terjadinya penurunan impor, terjadinya inflasi. Hal ini terjadi dan dirasakan oleh semua wilayah di Indonesia, tak terkecuali Kota Kediri, Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi pada Kota Kediri pada tahun 2020 diproyeksikan sebesar 2,5% year-on-year(yoy) mengalami

penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 5,47%. Menurut wali kota Kediri, Abdullah mengatakan bahwa salah satu penopang ekonomi di Kota Kediri adalah UMKM. Namun adanya pandemic COVID-19 ini menyebabkan semua UMKM kondisinya mengalami kesulitan dan bahkan ada yang mati. Untuk itu pemerintah melakukan berbagai macam upaya untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemic COVID-19.

Setiap wilayah atau daerah membutuhkan biaya tidak hanya dari APBN akan tetapi juga melalui pendapatan daerah untuk mencapai kemajuan ekonomi. Kemampuan yang dimiliki oleh suatu wilayah atau daerah dalam menyalurkan sumber daya yang berasal dari wilayah atau daerah dapat berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat bergantung pada kemampuannya untuk membantu perubahan potensi ekonomi yang ada menjadi suatu bentuk kegiatan ekonomi yang dapat menghasilkan dana bergulir untuk pembangunan daerah berkelanjutan. (Hasrini Hakim, 2021)

Pendapatan Asli Daerah atau yang disingkat dengan PAD ialah pendapatan yang didapatkan oleh daerah berdasar kepada Peraturan Daerah sejalan terhadap peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai tujuan dalam melimpahkan kewenangan terhadap pemerintah daerah guna dapat melakukan pendanaan terhadap upaya dalam melaksanakan otonomi daerah sejalan terhadap potensi yang daerah tersebut miliki dimana merupakan wujud desentralisasi. Persoalan ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang tercantum pada Pasal 285 yang berbunyi bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil yang diperoleh dengan upaya dalam mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan, pendapatan daerah yang sah, dan pendapatan transfer. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

ialah suatu indicator sumber pendapatan daerah yang pengaturannya dilakukan pada Pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi bahwa suatu hal yang pemerintah daerah dapatkan bisa dilangsungkan pengukurannya menggunakan uang dikarenakan otoritas yang diberikan masyarakat bisa berupa hasil dari pajak daerah dan retribusi daerah (BPS Kota Kediri, 2016). Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kediri dapat dilihat melalui perkembangan grafik berikut :



**Gambar 1.1 Grafik Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri Tahun 2016-2020**

Sumber: BPS Kota Kediri, 2020 (Data Diolah)

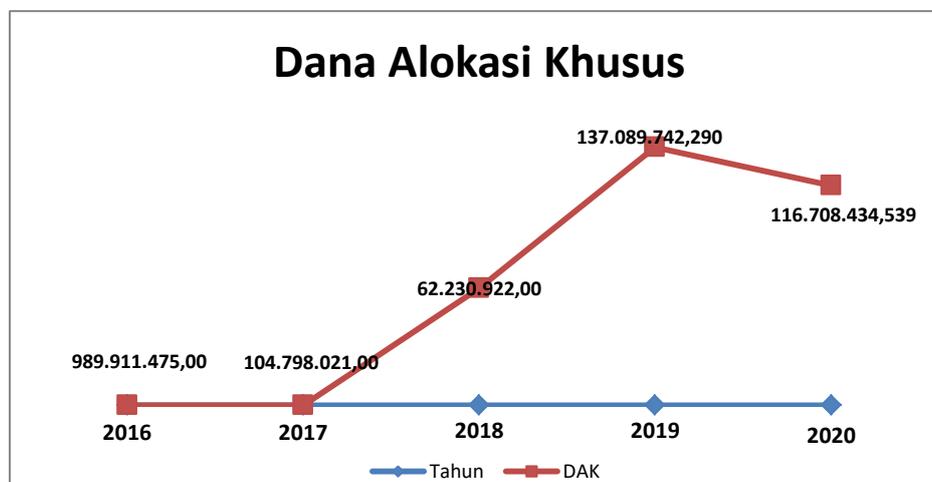
Berdasarkan gambar diatas memperlihatkan bahwa Pendapatan Asli Daerah di tahun 2016-2019 meningkat dan di tahun 2020 menurun. Di tahun 2016 jumlah Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri sejumlah Rp 238.318.315,51 senantiasa meningkat hingga di tahun 2019 sejumlah Rp 249.757.851,39. Penurunan jumlah Pendapatan Asli Daerah di tahun 2020 sejumlah Rp 239.764.641,01. Hal tersebut tidak terlepas dari dampak adanya pandemic Covid-19 yang terjadi selama tahun 2020.

Berdasarkan pendapat tersebut bisa dibentuk suatu simpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah sumber pendapatan daerah yang berasal dari

pajak daerah, retribusi daerah, hasil yang diperoleh dengan upaya dalam mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan, pendapatan daerah yang sah, dan pendapatan transfer yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk dapat mengelola keuangan dan mendanai otonomi di daerah yang merupakan upaya dalam melakukan perwujudan terhadap desentralisasi.

Dana Alokasi Khusus atau yang disingkat dengan DAK ialah sumber dana yang bersumber dari hasil pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan suatu kepada daerah dimana mempunyai tujuan guna mendorong pendanaan terhadap aktivitas khusus yang mana menjadi urusan yang dimiliki oleh daerah dan sejalan terhadap prioritas nasional. Seberapa besar penetapan Dana Alokasi Khusus (DAK) dilakukan di tiap tahun pada APBN yang mana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Menurut pendapat Wimpi Priambudi dalam jurnal nominal/volume VI nomor 1/tahun 2017 yang berjudul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013" mengatakan bahwa dalam penggunaannya Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mana pengaturannya dilakukan oleh pemerintah pusat yang dimana kegiatannya sekadar dipergunakan bagi pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana prasarana pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan yang dimana Pemerintah Daerah diharuskan melakukan pengalokasian terhadap dana pendamping sejumlah 10% dari nilai Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima sebagai bentuk kegiatan fisik. Data Dana

Alokasi Khusus (DAK) Kota Kediri dapat dilihat dengan perkembangan grafik sebagai berikut :



**Gambar 1.2 Grafik Dana Alokasi Khusus Kota Kediri Tahun 2016-2020**

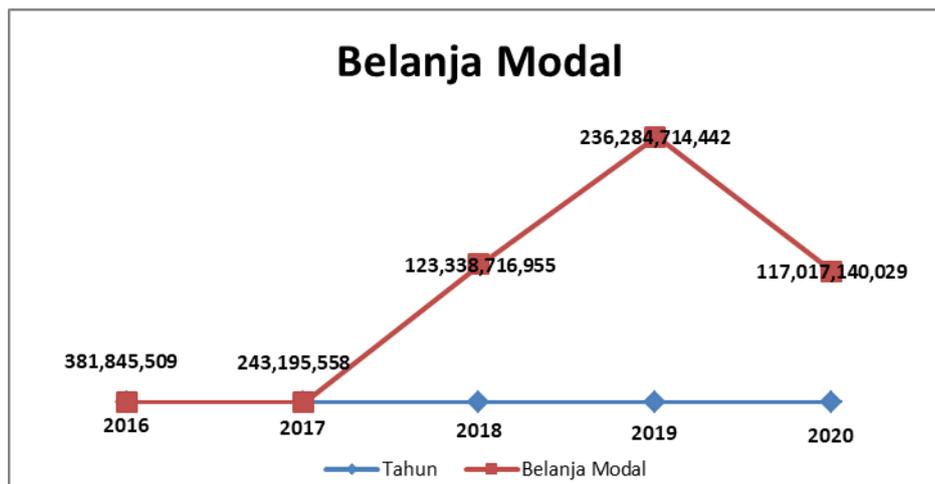
Sumber: BPS Kota Kediri, 2020 (Data Diolah)

Pada gambar 1.2 memperlihatkan bahwa Dana Alokasi Khusus di tahun 2016-2019 meningkat dan di tahun 2020 menurun. Di tahun 2016 jumlah Dana Alokasi Khusus Kota Kediri sebesar Rp 989.911.475,00 dan senantiasa meningkat di tahun 2019 sejumlah Rp 137.089.742,29. Di tahun 2020, Dana Alokasi Khusus menurun sejumlah 15%. Persoalan tersebut terjadi tidak terlepas dari dampak adanya pandemic Covid-19.

Dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) ialah sumber dana yang didapatkan melalui hasil pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di ditujukan pada suatu yang bertujuan dalam mendorong pendanaan pada aktivitas khusus sesuai dengan prioritas nasional.

Belanja Modal ialah sebuah anggaran yang dikeluarkan supaya bisa membentuk modal yang dilakukan dengan cara mengadakan, membeli ataupun membangun aset tetap (inventaris) dan aset lainnya dimana dapat memberikan manfaat lebih dalam satu tahun periode akuntansi. Aset pada belanja modal tersebut

bisa terdiri atas belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan aset tak berwujud. Di suatu Negara, belanja modal mempunyai peranan yang penting untuk membantu mewujudkan perekonomian Negara dengan baik. Belanja modal mempunyai manfaat dalam jangka panjang dalam memberi sebuah pelayanan yang baik kepada public. Menurut pendapat Yusuf Andrian dan Agus Samekto dalam jurnal telaah dan riset akuntansi vol.10 no 2 tahun 2017 dimana memiliki judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Pulau Jawa” mengatakan bahwa Belanja Modal diperuntukkan sebagai pembentukan modal dimana memiliki sifat mendorong peningkatan aset tetap atau inventaris yang dapat memberi suatu manfaat lebih dari satu periode akuntansi yang didalamnya terdapat pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang dimana memiliki sifat menjaga ataupun mendorong peningkatan atas manfaat, mendorong peningkatan atas kapasitas dan kualitas aset. Hal ini diperkuat dengan bersandar kepada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi Belanja Modal yang mana dimaksudkan pada pasal 50 huruf c dipergunakan untuk pengeluaran yang dijalankan pada tujuan membeli atau mengadakan ataupun membangun aset tetap berwujud yang memiliki nilai manfaat melebihi 12 bulan guna dipergunakan pada aktivitas yang dijalankan oleh pemerintahan, misalnya pada wujud tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Data Belanja Modal Kota Kediri tampak melalui perkembangan grafik di bawah ini :



**Gambar 1.3 Grafik Belanja Modal Kota Kediri Tahun 2016-2020**

Sumber: BPS Kota Kediri, 2020 (Data Diolah)

Pada gambar 1.3 memperlihatkan grafik Belanja Modal Kota Kediri selama lima tahun terakhir, yaitu pada tahun 2016-2020. Dapat diketahui grafik Belanja Modal diatas meningkat dan menurun secara relatif fluktuatif. Dimana pada tahun 2016 jumlah Belanja Modal Kota Kediri sebesar Rp 381.845.509,73 dan mengalami kenaikan sampai tahun 2019 sebesar Rp 236.284.714.442,00. Pada tahun 2020, Belanja Modal terjadi penurunan sebesar 50%. Realisasi belanja modal tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan dampak dari adanya pandemic Covid-19 yang terjadi selama tahun 2020.

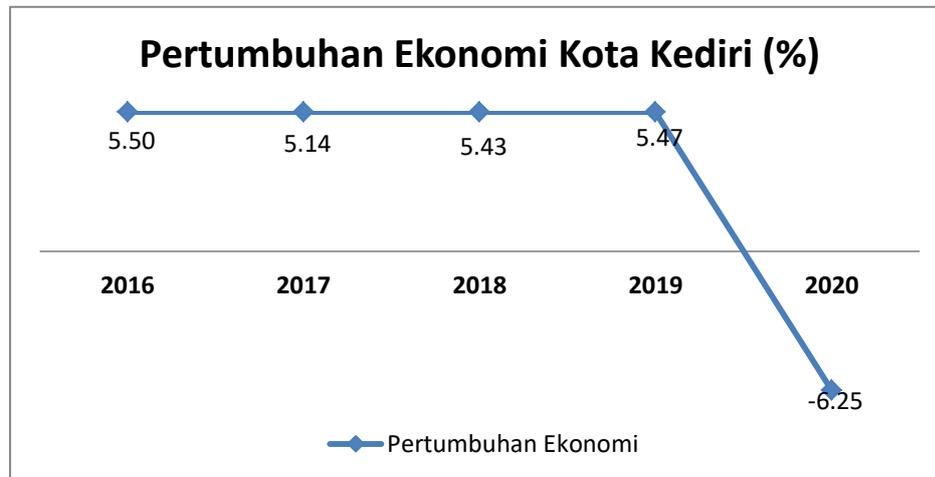
Bisa dirumuskan suatu simpulan bahwa Belanja Modal ialah suatu pengeluaran anggaran dimana dijalankan melalui cara mengadakan, membeli atau membangun sebuah asset tetap yang dapat memberikan manfaat pada periode waktu 1 (satu) tahun periode akuntansi. Dalam belanja modal, asset tersebut bisa berwujud belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan asset tak berwujud.

Pertumbuhan ekonomi ialah proses dimana terjadinya suatu perubahan keadaan perekonomian disuatu Negara secara berkesinambungan dimana bertujuan

guna mewujudkan keadaan ekonomi yang dinilai lebih baik hingga jangka waktu tertentu. Dimana terjadi peningkatan pendapatan yang diakibatkan oleh meningkatnya produksi barang dan jasa yang mana meningkatkan pendapatan tidak berkaitan terhadap peningkatan jumlah penduduk, dan diikuti dengan teknologi yang kian berkembang serta inovasi dalam bidang social. Dengan terdapatnya pertumbuhan ekonomi ialah indikasi dari kesuksesan dalam pembangunan ekonomi pada suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi juga bisa dikatakan sebuah proses kenaikan output per kapita. Perekonomian disuatu daerah dapat dinilai meningkat jika, proses kegiatan ekonomi yang mengalami peningkatan dalam satu periode sebelumnya, yang mengartikan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dapat mengalami penambahan di tahun selanjutnya. Pengukuran terhadap pertumbuhan ekonomi pada sebuah daerah dilakukan menggunakan Produk Domestic Regional Bruto (PDRB). Perhitungan terhadap laju pertumbuhan ekonomi bisa dilakukan berdasar kepada perubahan PDRB atas dasar harga konstan yang tiap tahunnya mengalami perubahan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan produksi perekonomian suatu daerah pada wujud peningkatan pendapatan nasional. Disuatu Negara dapat dinilai pertumbuhan ekonomi jika timbul suatu peningkatan Gross National Product (GNP) riil disuatu Negara tersebut (Asfia Murni, 2016:184) Perekonomian di sebuah daerah berkaitan terhadap keadaan perekonomian regional, Nasional dan global. adanya beberapa factor perekonomian yang tidak bisa dikontrol oleh suatu daerah misalnya berkaitan terhadap kebijakan pemerintah pusat dalam sector moneter ataupun sector riil. Perekonomian disuatu daerah turut dapat mendapatkan pengaruh oleh perekonomian global misalnya krisis keuangan global, peningkatan atau penurunan harga minyak dunia dan nilai tukar mata uang asing.

Dapat dilihat grafik dibawah ini adalah pertumbuhan ekonomi Kota Kediri tahun 2016-2020 di bawah :



**Gambar 1.4 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kota Kediri Tahun 2016-2020**

Sumber: BPS Kota Kediri, 2020 (Data Diolah)

Pada gambar 1.4 tampak bahwa pertumbuhan ekonomi di kota Kediri dari tahun 2016 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan hingga di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Kediri menurun. Persoalan ini berkaitan karena adanya dampak dari pandemic Covid-19 yang menyebar hampir diseluruh dunia dan menyebabkan tergoncangnya hampir seluruh perekonomian di daerah maupun Negara. Dilihat dari data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi diatas bisa diketahui bahwa selama lima tahun terakhir mengalami fluktuatif. Fluktuatif adalah keadaan dimana menunjukkan kondisi yang tidak tetap atau berubah-ubah. Dalam perkembangan lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi di Kota Kediri mengalami penurunan ditahun 2020, yaitu sebesar -6.25%. Hal tersebut terjadi tidak terlepas dari adanya pandemic Covid-19 yang terjadi di Indonesia selama tahun 2020. Dilihat dari jumlah PDRB harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Kediri pada tahun 2020 paling tinggi didapatkan oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sejumlah 17.82% dan Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sejumlah 9.94%. Pertumbuhan

negative pada tahun 2020 tertinggi terjadi pada sector Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 14,33%, Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran sejumlah 12,45% dan Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum sebesar 10,27% (BPS Kota Kediri, 2020).

Berdasarkan fenomena yang terjadi diatas dikarenakan factor Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal saling berkaitan guna mendorong terjadinya peningkatan atas pertumbuhan ekonomi, maka penulis melakukan penelitian yang diberi judul “**Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kediri**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang yang sudah peneliti uraikan sebelumnya, bisa dibentuk suatu rumusan atas permasalahan menjadi :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kediri ?
2. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kediri ?
3. Apakah Belanja Modal berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kediri ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan atas permasalahan yang sudah peneliti uraikan sebelumnya, tentunya perlu diketahui tujuan dalam penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kediri.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kediri.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kediri.

#### **1.4 Ruang Lingkup**

Berdasarkan dari pemaparan masalah yang dijelaskan dalam latar belakang diatas dapat diketahui bahwa peneliti memberikan ruang lingkup yang nantinya penelitian ini berjalan dengan terarah. Penelitian ini meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan studi pada pemerintahan di Kota Kediri selama periode tahun 2011-2020.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah(PAD), Dana Alokasi Khusus(DAK), dan Belanja Modal dimana variabel tersebut sebagai variabel independen dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel dependen.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pada hasil yang diperoleh pada penelitian tersebut, harapannya bisa memberikan manfaat yakni :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu ekonomi yang terkait dengan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kediri.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan ataupun sebagai bahan pertimbangan dalam melanjutkan program yang diberikan oleh pemerintah agar meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

## 3. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan studi dan informasi terkait Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Kediri.